

Laporan Akhir Proyek

Memperkuat Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas



Kata Pengantar

Saya sangat berbahagia bisa memberikan kata pengantar pada laporan penutupan proyek Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas.

Merupakan hal yang tidak biasa untuk menjalin kerjasama dalam bentuk formal, multi-tahun antara pemerintah kabupaten, LSM, donor dan sejumlah komunitas; dan kami harus berterimakasih kepada Pimpinan di Gumas yang mengambil resiko untuk mendukung inisiatif ini. Sejauh yang kami ketahui hal ini belum pernah terjadi di Gunung Mas, sehingga merupakan wilayah yang tidak dikenal oleh semua orang yang terlibat dalam kerjasama ini.

Dalam pemikiran kami kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor yang paling penting untuk memampukan pembangunan dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Inilah yang menjadi pengikat segala sesuatunya dan semua orang bersama-sama dalam masyarakat. Oleh karena itu menjadi penting bahwa masing-masing kita memberikan kontribusi untuk membuatnya berjalan lebih baik.

Kami merasa kerjasama ini telah mengambil langkah-langkah positif dalam meningkatkan kapasitas pemerintah untuk berinteraksi lebih efektif secara internal dan dengan pihak luar dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan, khususnya dengan masyarakat lokal yang terlibat dalam proyek ini.

Meskipun pekerjaan secara keseluruhan belum selesai, proyek ini sekarang akan segera berakhir, dan penting bagi kita untuk mengukur apa saja yang telah kita capai, dalam rangka terus bergerak maju dengan cara yang lebih efektif. Karena itu kami berharap laporan ini memberikan catatan yang bermanfaat mengenai capaian-capaian dan apa saja yang telah kita pelajari. Dan kami sangat berharap agar kita dapat melanjutkan perjalanan yang telah dimulai bersama ini.

Bardolf Paul, Pimpinan Yayasan Tambuhak Sinta



Daftar Isi

I. Pengantar	4
II. Pencapaian di Tahun Pertama	6
III. Pencapaian di Tahun Kedua	15
IV. Kesimpulan	23
V. Pembelajaran Secara Keseluruhan	24
VI. Rekomendasi	25
VII. Penutup	26

I. Pengantar

1. Latar Belakang

Yayasan Tambuhak Sinta (YTS) adalah sebuah organisasi mandiri yang mendedikasikan dirinya untuk membantu masyarakat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Meningkatkan kualitas tata kelola di wilayah ini tampaknya merupakan suatu langkah fundamental sebelum masyarakat mampu berfungsi secara mandiri dan berkelanjutan.

Yayasan Tambuhak Sinta (YTS) telah bekerja sama dengan pemerintah Gunung Mas lebih dari sepuluh tahun. Selama waktu ini, YTS bermitra dengan 22 komunitas di 3 kecamatan di Gunung Mas, memberikan dukungan dalam perencanaan partisipatif, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas. YTS juga telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 500 anak-anak dari keluarga miskin untuk menyelesaikan pendidikan mereka di sekolah menengah dan universitas. Dalam beberapa tahun terakhir, YTS telah bekerja sama dengan penambang emas skala kecil dan toko-toko emas untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya paparan merkuri beracun dan untuk memberikan dukungan teknis serta peralatan untuk mencegah pelepasan racun yang mematikan ini ke lingkungan.

Secara keseluruhan, proyek ini telah mendorong dampak terhadap kesehatan, pendidikan, pembangunan ekonomi, dan pemerintahan desa yang lebih baik di wilayah Kahayan. Melalui program mata pencarian, 427 orang telah dilatih dalam budi daya ikan, 254 orang pada pertanian sayuran, 177 pada budidaya karet, dan 66 orang pada ternak babi. Menyangkut program pendidikan, pada tahun 2012, total 109 orang mendapat beasiswa, termasuk 68 siswa SMA (31 perempuan dan 33 laki-laki) dan 41 mahasiswa (22 perempuan dan 19 laki-laki).

Mulai bulan Oktober 2011, YTS memperluas dukungannya terhadap pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kapasitas dan prosedur dalam perencanaan dan penganggaran. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam menanggapi kebutuhan masyarakat melalui skema formal, yaitu proses perencanaan tahunan. Proyek ini sebagian besar didanai oleh Ford Foundation, dan memberikan manfaat langsung bagi 6 desa, 3 kecamatan, dan lebih dari 16 lembaga kabupaten.

Dana yang telah dikeluarkan oleh YTS untuk proyek-proyek tersebut pada tahun 2012 adalah:

- Tata kelola pemerintahan desa dan mata pencarian - Rp. 2.976.797.683
- Proyek tata kelola pemerintahan - Rp. 629.151.704
- Program Pendidikan - Rp. 70.960.000

2. Proyek Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Di Gunung Mas, seperti di sebagian besar daerah terpencil lain, ada kesenjangan yang besar antara pemerintah dan masyarakat setempat. Sebagian besar karena tantangan geografis dan komunikasi yang buruk antara pemerintah dan masyarakat, namun masih ada kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan dari semua orang yang terlibat. Sejak tahun 2004, YTS telah memperkenalkan proses perencanaan partisipatif dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat di 3 kecamatan di sepanjang hulu daerah aliran sungai (DAS) Kahayan, sebagai langkah untuk membantu menjembatani kesenjangan ini. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara lebih efektif dengan pemerintah daerah, namun demikian masih ada kebutuhan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk terlibat secara lebih efektif dengan masyarakat. Untuk mengatasi kebutuhan ini, YTS mampu mendapatkan pendanaan dari Ford Foundation dan menandatangani Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Gunung Mas pada tahun 2011 untuk proyek penguatan tata kelola pemerintahan selama dua tahun.

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pemerintah dan mekanisme penganggaran, sehingga ada kerjasama yang lebih efektif dengan proses perencanaan masyarakat, penyerapan yang lebih besar terhadap proposal dari masyarakat, dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Proyek ini dilaksanakan di 3 kecamatan percontohan, 6 desa percontohan, dan dengan 7 instansi pemerintah kabupaten (SKPD) sebagai mitra utama: Badan Perencanaan, Pemberdayaan Masyarakat, Perikanan dan Peternakan, Pertanian dan Perkebunan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, dan Pendidikan. Untuk beberapa kegiatan peningkatan kapasitas khusus, hingga saat ini sebanyak 20 SKPD telah terlibat.

Good governance tidak hanya masalah teknis, tetapi juga terkait erat dengan komitmen dan kemauan politik. Untuk menguji kedua aspek tersebut, laporan ini akan fokus tidak hanya pada hasil kuantitatif, tetapi juga pada perubahan perilaku.

II. Pencapaian di Tahun Pertama

1. Penguatan Kapasitas

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten agar untuk bekerja lebih efektif dengan perencanaan dan penganggaran yang ada, kombinasi dari pelatihan, bantuan teknis, dan kunjungan studi digunakan untuk mengatasi kesenjangan. Proyek ini menggunakan metodologi pembelajaran orang dewasa dalam segala aktivitas.



Sesi perkenalan dan membangun tim pada pelatihan SKPD



Sesi Pelatihan Desa



Kelompok kerja pada pelatihan SKPD

Daftar Kegiatan pada Tahun Pertama: Oktober 2011 - Oktober 2012

Ada 19 kegiatan penguatan kapasitas pada tahun pertama proyek ini sebagai berikut:

Tanggal	Kegiatan	Peserta
17-20 Oktober	Studi Analisis Keuangan Gumas	Studi data dari Bappeda, Dinas Pengelolaan Aset & Keuangan
17-20 Oktober	Kajian Perencanaan Tahunan yang Lebih Baik di Gumas	8 SKPD
1-2 Desember	Lokakarya Pembukaan Proyek	20 SKPD, Pejabat Gumas,dan DPRD
4-5 Januari	Pelatihan Pengorganisasian Masyarakat dan Perencanaan serta Penganggaran Partisipatif	6 Desa dan YTS
6 Januari	Lokakarya Pendampingan Perencanaan Tahunan Desa	6 Desa dan YTS
17-18 Januari	Lokakarya Penyusunan Kerangka Logis Tim Teknis Pemerintah	8 SKPD
17-25 Januaari	Pendampingan Musrenbang Desa	6 Desa
19 Januari	Lokakarya Membangun Sinergi antara Renstra SKPD dengan RPJMD Gumas	8 SKPD
8-9 Februari	Pelatihan Membangun Relasi Konstituen dengan DPRD	YTS
15-16 Februari	Pelatihan membangun Program Pemerintah yang Efektif	8 SKPD
20-21 Maret	Pelatihan Membaca APBD untuk Desa	21 desa
22 Maret	Pelatihan Membangun Relasi Konstituen dengan DPRD	21 desa
9-11 April	Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kebumen	2 SKPD dan YTS
11-13 April	Kunjungan Belajar ke Kabupaten Tuban	4 SKPD, 6 Desa dan YTS
12-13 Juni	Pendampingan Revitalisasi ADD dan Menyusun Kebijakan Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) 2013	2 SKPD dan YTS
22 Juni	Lokakarya Revitalisasi ADD	12 Kecamatan & SKPD
4-6 Juli	Pendampingan Perencanaan Tahunan	3 SKPD
10-13 Juli	Pendampingan Penyusunan Rekomendasi kebijakan revitalisasi ADD	3 SKPD dan YTS
1-30 Oktober	Penyusunan Rencana Kerja untuk Tahun Kedua	6 SKPD, 6 pilot villages



Penguatan kapasitas staf YTS untuk mendukung pelaksanaan proyek di Desa uji coba

2. Advokasi Kebijakan

Proyek ini meningkatkan kerangka kerja kebijakan untuk mencapai efisiensi sistem khususnya pada perencanaan dan penganggaran. Hal ini dilakukan dengan cara membuat panduan untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya dalam rangka merespon kebutuhan desa dan meningkatkan kinerja pemerintahan desa.

Perbaikan kebijakan untuk Distribusi Anggaran ke Desa yang Lebih Baik

BPMDDP-KB telah mengambil inisiatif yang baik untuk memperbaiki kebijakan yang mengatur pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Gunung Mas. Proyek ini mendukung inisiatif tersebut dengan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kebumen dan kunjungan belajar ke Kabupaten Tuban. Selanjutnya, proyek ini juga memfasilitasi BPMDDP-KB menyusun rekomendasi kebijakan kepada Bupati berupa usulan agar memisahkan anggaran pemerintah untuk membayai honor pemerintahan desa dari ADD. Dengan demikian akan ada dua kebijakan yang mengatur ADD dan yang mengatur dana pertambahan untuk desa. Dengan demikian akan ada yang mengatur keuangan desa yaitu:

1. Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa (yang Bersumber dari DAU dan Bagi Hasil Pajak atau dalam bentuk ADD).
2. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dibebankan pada APBD Kabupaten Dalam Hal Ini DPA¹ Kecamatan dan tidak dibebankan pada APBDes.

Penyusunan rekomendasi kebijakan ini melibatkan tiga SKPD yaitu: BPMDDP-KB, Bappeda dan Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan.

Bappeda juga meluncurkan Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) yang memberikan setiap desa suatu alokasi anggaran secara spesifik, sehingga akan memudahkan mereka untuk memilih proyek yang akan dibiayai oleh Pemerintah.

¹ Daftar Prioritas Anggaran



YTS memfasilitasi BPMPDP-KB melakukan kunjungan belajar ke Kabupaten Tuban mengenai revitalisasi ADD



Perwakilan dari BPMPDP-KB dan Bappeda memberikan kenang-kenangan kepada pemerintah Kebumen



Martinus, dari salah satu desa uji coba mengajukan pertanyaan mengenai ADD di Desa klotok, Tuban

Integrasi Data untuk Pembangunan Partisipatif

BPMDP-KB bersama-sama dengan YTS dan PNPM sepakat untuk melakukan sinergi program dalam memberikan dukungan kepada desa dengan mengintegrasikan proses perencanaan partisipatif dengan menggunakan system pemerintah. Sehingga saat ini hanya ada satu proses perencanaan di setiap desa.



Surat edaran Bupati yang ditandatangani Sekda mendukung Pembangunan Partisipatif



Diskusi Kelompok Laki-laki pada penyusunan RPJMDesa di Desa Tumbang Sian



Diskusi Kelompok Perempuan pada penyusunan RPJMDesa di Desa Tumbang Tajungan

3. Hasil Monitoring dan Evaluasi

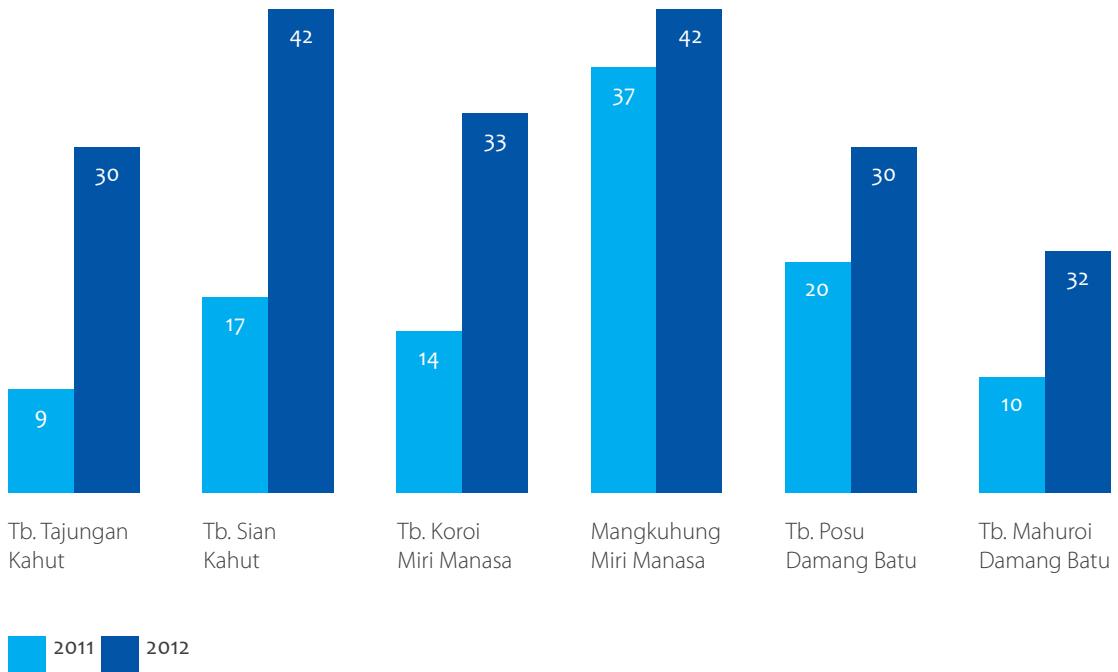
Dalam rangka untuk berbagi pembelajaran proyek dengan semua pemangku kepentingan, dan untuk memastikan proyek ini berada pada jalur yang benar, monitoring dan evaluasi telah memainkan peran penting dalam proyek ini. Tujuan utama proses ini adalah untuk merangsang perubahan dan untuk mendorong pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik di Gunung Mas.

Daftar Kegiatan Monitoring pada Tahun Pertama – Oktober 2011 - Oktober 2012

Tanggal	Kegiatan	Peserta
21-25 Februari	Monitoring Musrenbang Kecamatan 2012	3 Kecamatan uji coba
14 Maret	Monitoring Forum Gabungan SKPD 2012	11 Kecamatan dan 24 SKPD
15 Maret	Monitoring Musrenbang Kabupaten 2012	11 Kecamatan, 24SKPD, Pejabat Gumas, DPRD,& Dunia Usaha
6-12 Januari 11-15 Juni 9-10 Agustus	Monitoring Proyek 2012 (I, II, III)	3 Kecamatan, 6 Desa, 7 SKPD

Musrenbang Desa di 6 Desa Uji Coba

Gambar 1: Tingkat Partisipasi di Musrenbang Desa tahun 2011-2012



Merujuk pada gambar di atas, ada peningkatan yang signifikan dalam hal partisipasi masyarakat pada kegiatan Musrenbang di 6 desa uji coba. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, ada dua pencapaian kunci yaitu 1) keterlibatan masyarakat yang lebih efektif pada proses perencanaan, 2) Adanya hasil yang lebih terukur dikarenakan adanya kebijakan Pagu Indikatif Kecamatan (PIK).

Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan di 3 kecamatan uji coba cukup berhasil. Kecamatan Damang Batu melakukan Musrenbang pada tanggal 21 Februari 2012 dengan jumlah peserta 69 orang. Komposisi peserta terdiri dari delegasi desa, aparat kecamatan dan unit perwakilan SKPD di kecamatan, Bappeda dan beberapa SKPD serta anggota DPRD dari daerah pemilihan Damang Batu. Hari berikutnya dilakukan Musrenbang di Kecamatan Kahayan Hulu Utara dengan jumlah peserta 63 orang. Kecamatan Miri Manasa dihadiri oleh 69 peserta. Komposisi peserta dari kedua kecamatan tersebut sama dengan Kecamatan Damang Batu.

Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Damang Batu berhasil menyusun dokumen rencana kerja kecamatan berdasarkan PIK. Sedangkan Kecamatan Miri Manasa masih memuat daftar panjang usulan karena desa-desa tidak mendapatkan cukup penjelasan dan panduan dari pihak kecamatan soal PIK. Oleh sebab itu, Kecamatan dipandu oleh Bappeda mengkaji ulang usulan-usulan tersebut agar sesuai dengan kriteria PIK.

Kali ini, penduduk desa menemukan lingkungan yang lebih baik dalam hal perencanaan kecamatan agar suara mereka bisa terdengar.

Forum Gabungan SKPD

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 14 Maret 2012 di ruang pertemuan Bappeda. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 112 orang yang terdiri dari 90% pejabat dan staf pemerintah, selebihnya terdiri dari YTS dan PNPM.

Tahun ini, Forum Gabungan SKPD dirancang berbeda dari tahun sebelumnya yaitu hanya 5 SKPD yang mengelola PIK yang melakukan presentasi di forum tersebut, yaitu: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian & Perkebunan, dan Dinas Perikanan & Peternakan. Kepala Bappeda memfasilitasi pertemuan merangkap sebagai pembicara utama dan narasumber (sebagai salah satu unsur pengambil kebijakan). Pendekatan yang komprehensif dan praktis dari Kepala Bappeda tersebut menghasilkan pertemuan yang produktif.

Perubahan desain forum merupakan konsekuensi dari pelaksanaan PIK pada lima lembaga yang dipilih. Di masa depan ini harus diterapkan kepada seluruh lembaga lainnya, untuk menjamin akuntabilitas yang lebih besar dalam keseluruhan proses perencanaan tahunan.

Badan Perencanaan mengakui bahwa Gunung Mas tidak punya waktu yang cukup dan anggaran untuk menjalankan forum SKPD secara ideal. Di Kabupaten Kebumen, dibutuhkan dua minggu penuh untuk melakukan serangkaian forum SKPD dan menyelesaikan segala sesuatunya dalam forum gabungan tersebut. Sedangkan pembbiayaannya tiga kali lipat dari alokasi anggaran yang digunakan oleh Kabupaten Gunung Mas pada saat ini.

Musrenbang Kabupaten

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 15 Maret 2013 di ruang pertemuan Bappeda setelah forum SKPD. Sebanyak 89 orang hadir yang terdiri dari unsur pemerintah, DPRD, Dunia Usaha, YTS dan PNPM.

Daftar Usulan Desa yang Disetujui:

Sekitar 10 usulan dari 30 usulan dari desa uji coba disetujui melalui skema musrenbang untuk realisasi tahun 2013.

Gambar 2: Usulan 6 desa uji coba yang disetujui pemerintah untuk anggaran 2012

Kategori Proyek	Lokasi
Dinas Kesehatan	
Pengadaan mebel untuk Pustu	Tumbang Sian
Perangkat alat promosi kesehatan untuk Pos Yandu: Timbangan anak dan bayi, Pita LILA, Sarung Timbang, alat ukur tinggi badan, poster, stiker dsb. (revisi anggaran 2013)	Tumbang Tajungan, Tumbang Sian, Tumbang Koroi, Mangkuhung, Tumbang Posu & Tumbang Mahuroi
Dinas Pendidikan	
Mebel baru untuk Sekolah Dasar (SD)	Tumbang Tajungan
Perbaikan kecil untuk ruang guru SMP	Tumbang Sian
Perbaikan rumah dinas guru	Tumbang Posu
Mebel untuk SD dan SMP	Tumbang Mahuroi



Foto bersama setelah menerima Posyandu Kita semua perwakilan 6 desa uji coba di di Desa Tumbang Sian.



Kepala Dinas Kesehatan menyerahkan Posyandu kit kepada perwakilan Desa Tumbang Tajungan



Tumbang Tajungan; Kepala BPMPDP-KB menyerahkan Posyandu Kit kepada perwakilan Desa Mangkuhung

Berdasarkan informasi dari desa uji coba, realisasi proyek 2013 masih ada yang belum dilaksanakan sebagai berikut:

1. Perbaikan rumah dinas guru di Desa Tumbang Posu
2. Mebel baru untuk SD di Desa Tumbang Tajungan
3. Mebel baru untuk SD dan SMP di Desa Tumbang Mahuroi
4. Perbaikan kecil ruang guru di Desa Tumbang Sian

Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan, proses tender mebel sekolah SD dan SMP telah selesai dan pihak kontraktor sedang mendistribusikan mebel di desa-desa. Sementara itu proyek di Desa Tumbang Sian dibatalkan karena belum memenuhi kriteria dukungan dari DAK.

Kepala Dinas Pendidikan memerlukan klarifikasi lebih lanjut tentang proyek Desa Tumbang Posu.

Pembelajaran dari Kegiatan Monev

Monitoring kuartal pertama hanya dilakukan oleh YTS. Bappeda sebagai koordinator proyek ini dari pihak pemerintah tidak dapat menyediakan stafnya untuk melakukan monitoring selama 6 hari di desa uji coba bersama YTS. Walaupun para pejabat dan mitra langsung SKPD cukup tertarik dengan hasil dari kegiatan monitoring ini. Namun, mereka tampak tidak merasa memiliki hasil dari monitoring tersebut. Sehingga dalam rangka membangun rasa kepemilikan terhadap kegiatan-kegiatan di proyek ini termasuk monitoring dan evaluasi (monev), Koordinator Proyek merancang ulang pendekatan dari kegiatan ini dengan memastikan adanya keterlibatan mitra langsung yakni SKPD dalam proses monitoring, evaluasi dan berbagi pembelajaran.

Meskipun kegiatan monev dengan pendekatan partisipatif ini memakan waktu dan dana yang jauh lebih banyak untuk mengkonsolidasikan data, hal tersebut merupakan pengalaman berharga bagi semua orang yang terlibat dan hasilnya lebih memuaskan. Bagi staf pemerintah, hal ini merupakan pengalaman baru yang menarik dan mereka merasa ada kepemilikan atas proses dan hasil monitoring dan evaluasi tersebut. Sikap mereka terhadap proyek ini telah meningkat pesat, dan ini diwujudkan dalam beberapa cara antara lain mereka mengambil peran yang lebih besar dalam pelaksanaan kegiatan, mereka memberikan masukan untuk meningkatkan pelaksanaan proyek, dan mereka berbagi perasaan mereka tentang tantangan yang mereka hadapi dalam pekerjaan sehari-hari dan bagaimana pengetahuan dari proyek tersebut memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik.

Dampaknya, supervisor mereka lebih memperhatikan keberadaan proyek ini. Pada saat ini komitmen meningkat dari kepala instansi pemerintah, sehingga mengirimkan lebih banyak staf untuk acara monitoring pada triwulan ketiga.

III. Pencapaian di Tahun Kedua

1. Penguatan Kapasitas

Proyek ini melanjutkan kegiatan peningkatan kapasitas staf pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten untuk bekerja lebih efektif di bidang perencanaan dan penganggaran yang ada. Hal ini termasuk pendampingan khusus kepada Dinas Kesehatan untuk penyusunan rancangan rencana strategis yang baru.



Sesi pleno pada pelatihan SKPD



Sesi presentasi pada pelatihan desa



Sesi diskusi pada pelatihan SKPD

Daftar Kegiatan untuk Tahun Kedua - November 2012 - Juni 2013

Ada 14 kegiatan penguatan kapasitas di tahun kedua sebagai berikut:

Tanggal	Kegiatan	Peserta
6-7 November	Pelatihan Perencanaan Strategis Desa	YTS
11-15 November	Pendampingan Penyusunan Rencana Strategis Desa	4 Desa
12-14 November	Pelatihan untuk Fasilitator Bappeda tentang Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD	1 SKPD
23 November	Lokakarya Penyusunan PIK 2014	12 Kecamatan & 10 SKPD
8-10 Januari	Pelatihan untuk Pelatih Musrenbang Desa	YTS
15 Januari	Pembekalan tentang Kampanye Masyarakat pada bidang Kesehatan dan Pendidikan	6 Desa dan SKPD
16-17 Januari	Pelatihan Fasilitator Musrenbang Desa	21 Desa
6-7 Februari	Pelatihan dan Pendampingan Musrenbang Kecamatan	5 Kecamatan dan PNPM
4-6 Maret	Pendampingan Persiapan Forum Gabungan SKPD	5 SKPD
3-4 April	Pelatihan Perencanaan Strategis	20 SKPD
14 Mei	Pelatihan teknik VIPP & analisa stakeholder untuk Dinas Kesehatan	1 SKPD
16-18 Juni	Pendampingan Perencanaan Strategis untuk Dinas Kesehatan	1 SKPD
11-13 September	Pelatihan Penganggaran Berbasis Kinerja	20 SKPD



Penguatan kapasitas staf YTS untuk mendukung pelaksanaan Proyek Governance di desa uji coba.

2. Advokasi Kebijakan

Proyek ini mendukung Bappeda mengusulkan rancangan baru kebijakan PIK untuk tahun 2014 melalui sebuah lokakarya. Namun, usulan ini tidak diterima oleh Bupati karena pemerintah (Bupati) merasa bahwa Gumas belum siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Di sisi lain, proyek ini berhasil mendukung pendekatan partisipatif dalam perencanaan strategis dengan Dinas Kesehatan, dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam membuat rencana strategis untuk tahun 2014-2018. Badan ini menggunakan pendekatan partisipatif dalam pengumpulan data, bersama dengan penelitian data sekunder, dan berakhir dengan konsultasi publik mengenai draft rencana strategis mereka. Pendekatan ini digunakan untuk mengimplementasikan UU Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPN).



Gambar-gambar ini adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data pada penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan. Ini menjadi bukti bahwa pendekatan partisipatif telah dilakukan mulai dari penguatan kapasitas tim penyusun renstra, diskusi kelompok terfokus dengan pengguna layanan (masyarakat), wawancara dengan penyedia layanan dan evaluasi kinerja pencapaian renstra tahun 2009-2013. Kepala Dinas berkontribusi juga pada kegiatan pengumpulan data ketika melakukan kunjungan ke desa.

3. Hasil-hasil Monitoring dan Evaluasi

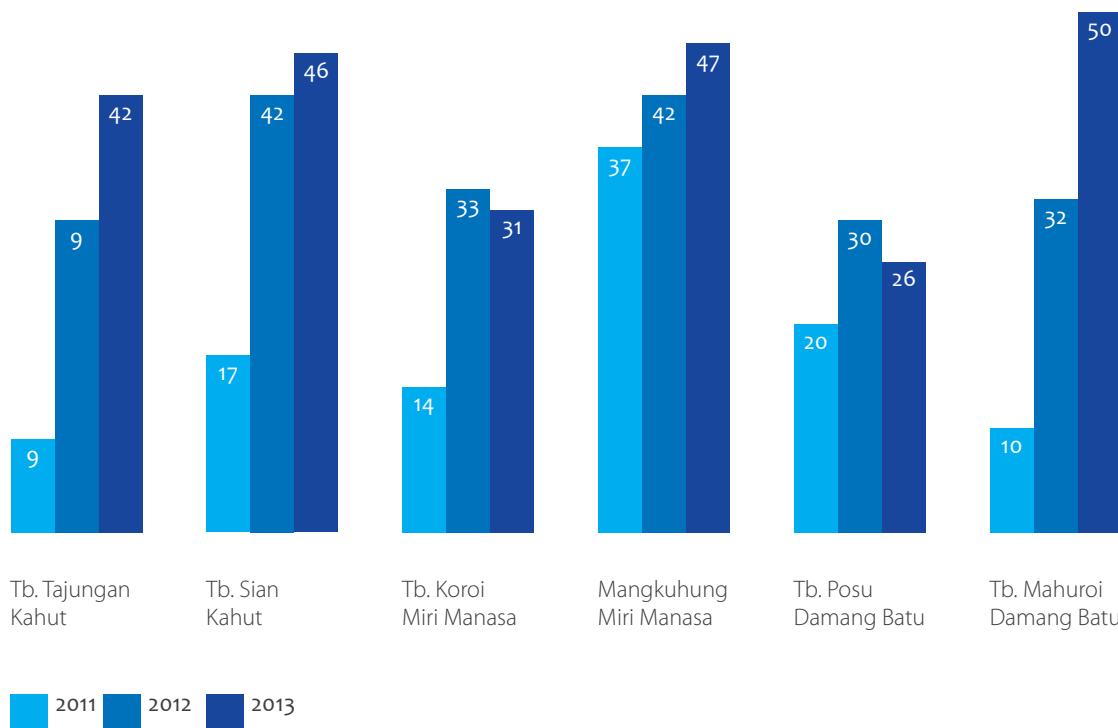
Daftar Kegiatan Monitoring Tahun Kedua – November 2012-November 2013

Tanggal	Kegiatan	Peserta
21-30 Januari	Monitoring Musrenbang Desa 2013	Program Officer YTS
11-14 Februari	Monitoring Musrenbang Kecamatan 2013	3 Kecamatan
13 Maret	Monitoring For gab SKPD 2013	12 Kecamatan dan 5 SKPD
14 Maret	Monitoring Musrenbang Kabupaten 2013	12 Kecamatan, 24 SKPD, Pejabat Gumas, Dunia usaha dan DPRD
20-24 Mei	Monitoring Proyek 2013 (mid-terms)	Desa, 3 Kecamatan, 7 SKPD, 4 unsur Pimpinan Daerah

Musrenbang Desa di 6 Desa Uji Coba

Terjadi sedikit penurunan jumlah peserta di Tumbang Koroi dan Tumbang Posu, namun proses berjalan dengan baik di setiap desa. Meskipun masyarakat merasa kecewa atas pembatalan kebijakan Pagu Indikatif Kecamatan pada anggaran tahun 2013, mereka masih percaya pada sistem perencanaan bagi pembangunan desa. Tahun ini unit SKPD di kecamatan menghadiri Musrenbang desa di semua lokasi. Dokumentasi dari Musrenbang juga lebih baik dan lebih lengkap.

Gambar 3: Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Musrenbang Desa 2011-2013



Musrenbang Kecamatan di 3 Kecamatan Uji Coba

Kecamatan Kahayan Hulu Utara melaksanakan rencana aksi yang mereka buat pada saat pelatihan dan pendampingan untuk persiapan musrenbang yaitu membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM). Fasilitator Kecamatan PNPM ditunjuk sebagai fasilitator musrenbang dan panitia menjalankan fungsi lainnya. Jumlah peserta dan panitia secara keseluruhan ada 70 orang.

Kecamatan Miri Manasa belum menjalankan rencana aksi hasil pelatihan dan pendampingan persiapan Musrenbang sepenuhnya. TPM belum aktif sepenuhnya. Camat menjadi pimpinan pertemuan sekaligus moderator kegiatan. Jumlah peserta yang hadir adalah 56 orang terdiri dari 15 perempuan dan 41 laki-laki.

Kecamatan Damang Batu menjalankan rencana aksi hasil pelatihan dan pendampingan persiapan Musrenbang sepenuhnya dengan baik. Fasilitator dari kegiatan ini adalah Sekretaris Kecamatan. TPM terdiri dari unsur staf kecamatan dan unsur masyarakat. Ada partisipasi aktif baik dari peserta laki-laki maupun peserta perempuan. Jumlah peserta sebanyak 63 orang terdiri dari 47 laki-laki dan 16 perempuan.



Bapak Gantian Pasti, perwakilan Bappeda



Bapak Bambang Harapan, perwakilan DPRD



Salah satu peserta menyampaikan pertanyaan



Sesi pembukaan pada musrenbang Kecamatan Damang Batu

Forum Gabungan SKPD

Hasil Forum Gabungan SKPD yang cukup baik, meskipun tidak ada pedoman Pagu Indikatif Kecamatan. Usulan kegiatan dan hasil dari Desa pada Musrenbang kecamatan dapat dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (Dana Alokasi Khusus / DAK) dan Dana Perimbangan dari pemerintah provinsi. Pelaksanaan akan tergantung pada berapa banyak proposal yang sesuai dengan kriteria dan plafon anggaran yang tersedia dari salah satu dari sumber-sumber ini.

Meskipun praktik ini tidak ideal, namun masih sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kepala Badan Perencanaan dalam sambutannya menyebutkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya PIK, tapi belum siap untuk menerapkannya sekarang karena komitmen anggaran sebelumnya untuk membiayai proyek multi years.



Diskusi pada meja Distabun



Diskusi pada meja Dinas Pendidikan



Diskusi pada meja Dinas Pekerjaan Umum



Diskusi pada meja Diskannak



Diskusi pada meja Dinas Kesehatan



Konsultasi dengan Kepala Bappeda

Musrenbang Kabupaten

Hasil dari Forum Gabungan SKPD dipresentasikan pada Musrenbang Kabupaten. Bupati tidak memberikan komentar khusus pada presentasi masing-masing SKPD (Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan, Pertanian & Perkebunan, Perikanan & Peternakan) berupa persetujuan, penolakan atau catatan terhadap usulan SKPD dari hasil Forum Gabungan tersebut. Dengan demikian tidak dapat disimpulkan apakah hasil Forum Gabungan SKPD itu diterima secara keseluruhan, diterima sebagian atau ditolak oleh Bupati.

Daftar usulan Desa yang Disetujui:

Sekitar 12 usulan dari 30 usulan desa uji coba yang disetujui melalui skema musrenbang untuk realisasi tahun 2014.

Gambar 4: Usulan 6 desa uji coba yang disetujui pemerintah untuk anggaran 2014

Kategori Proyek	Lokasi
<i>Dinas Pendidikan</i>	
Pembangunan kantor guru	Tumbang Posu
Pembangunan rumah dinas guru SD	Tumbang Mahuroi
Ruang Kelas Baru (RKB) SD	Mangkuhung
Pembangunan rumah dinas SD	Tumbang Koroi, Mangkuhung
<i>Dinas Kesehatan</i>	
Pembangunan Puskesdes (termasuk 2 petugas kesehatan dan alat kesehatan)	Tumbang Posu
<i>Dinas Perikanan dan Peternakan</i>	
Bibit Babi 26 pasang	Tumbang Mahuroi
Bibit Babi	Tumbang Posu
Pelatihan usaha perikanan	Tumbang Koroi, Mangkuhung
<i>Dinas Pertanian dan Perkebunan</i>	
Bantuan Bibit Padi	Tumbang Koroi, Mangkuhung

Keterlibatan Warga yang Efektif di Desa Uji Coba mengenai Isu Kesehatan dan Isu Pendidikan

Desa Tumbang Tajungan di Kecamatan Kahayan Hulu Utara telah berhasil memobilisasi partisipasi warga untuk mengadakan kelompok bermain gratis bagi anak-anak pra-sekolah. Ada 18 anak didik dan 2 guru sukarelawan.

Bupati dan YTS memberikan penghargaan atas inisiatif pemerintah desa dan warga untuk memajukan pendidikan.



Sertifikat Penghargaan dari Bupati untuk Kelompok Bermain Tunas Harapan



Salah satu kegiatan Kelompok Bermain Tunas Harapan

Pembelajaran dari Kegiatan Monitoring dan evaluasi

Keberhasilan pendekatan partisipatif pada kegiatan monitoring dan evaluasi di tahun pertama, memberikan pengaruh untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah pada tahun kedua. Metodologi yang digunakan merupakan hal baru bagi semua orang dan hal ini merupakan pengalaman belajar yang positif bagi mereka yang terlibat. Setelah itu, mereka antusias untuk melanjutkan penggunaannya pada tahun kedua.

Meskipun isi dari monitoring ini tampaknya cukup sederhana, namun setelah pertanyaan kunci ditanyakan, maka responden memberikan cukup banyak informasi detail karena mereka bebas berbicara mengenai pengalaman dari proyek ini, mulai dari peningkatan kapasitas hingga dampak yang akhirnya bisa mereka rasakan dari berbagai kegiatan.

Namun deikian masih terlalu dini untuk mengetahui apakah praktek yang baik ini akan terus berlanjut setelah proyek ditutup.

IV. Kesimpulan

Proyek ini berhasil mencapai target-target yang ditetapkan dalam tujuannya sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan penguatan kapasitas di atas 82% di setiap tingkatan (desa, kecamatan dan kabupaten);
2. Tingkat partisipasi dalam kegiatan Musrenbang di lokasi pendampingan YTS meningkat tajam (30% sampai dengan 500% sejak proyek dimulai);
3. Dokumen RPJMDesa yang lebih baik di beberapa desa uji coba;
4. Meningkatnya jumlah usulan desa uji coba yang disetujui melalui Musrenbang dan sebagainya.

Proyek ini juga dalam beberapa hal berkontribusi pada perubahan prilaku seperti misalnya:

1. Kerjasama yang baik antar SKPD untuk revitalisasi ADD,
2. Kerjasama tim yang baik dalam menjalankan pendekatan partisipatif dalam penyusunan rencana strategis di Dinas Kesehatan
3. Partisipasi yang lebih baik di masyarakat desa dalam pembuatan perencanaan tahunan, RPJMDesa, sehingga hasilnya masyarakat lebih memahami pentingnya musrenbang dan RPJMDesa);
4. Kerjasama yang baik antara pemerintah, PNPM dan YTS dalam memperkuat perencanaan desa;
5. Meningkatnya lebih banyak lagi prilaku positif staf pemerintah terhadap proyek ini;
6. Meningkatnya kesadaran pemerintah desa dan warga desa dalam memajukan pendidikan dan kesehatan di desa dan sebagainya.

Proyek ini juga menghadapi beberapa tantangan ke depan:

1. Sejumlah pejabat di Gumas yang memiliki komitmen terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan memasuki masa pensiun. Kita tidak tahu apakah pejabat baru akan memiliki komitmen yang sama atau tidak terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Gumas.
2. Pemerintah masih memiliki "pekerjaan rumah" untuk menyusun kebijakan Pagu Indikatif Kecamatan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2004 tentang Tahapan, Prosedur untuk Persiapan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Pada Pasal 17 (4) dinyatakan bahwa:

"Rancangan RKPD berisi kerangka kerja ekonomi daerah, program prioritas pembangunan, rencana kerja, dan kerangka pembiayaan serta pagu indikatif..."
3. Gumas telah memiliki beberapa prestasi termasuk melalui fasilitasi proyek ini. Namun, dari sudut pandang proyek ini, Pemerintah Gumas masih perlu untuk meningkatkan perencanaan strategis dan perencanaan tahunannya. Sebagai contoh: Dinas Kesehatan telah berhasil meningkatkan kualitas perencanaan strategisnya. Namun, masih ada lebih dari 16 SKPD memerlukan pendampingan untuk membuat perencanaan strategis yang lebih baik.

V. Pembelajaran Secara Keseluruhan

Menggunakan pendekatan partisipatif menjadi mahal dalam hal waktu dan uang, tetapi membawa hubungan emosional yang nyata antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek ini, dan karena itu menghasilkan hasil yang kuat dan prestasi yang lebih baik.

Pengetahuan yang ditransfer oleh proyek ini berguna bagi para mitra langsung untuk tampil lebih baik dalam karya-karya mereka. Proyek ini juga menyediakan konsep terbaru yang relevan dengan peraturan baru. Sebagai contoh: perencanaan tahunan pemerintah dan penyelesaian perencanaan strategis. Hal ini juga termasuk proses yang lebih baik dari gabungan forum SKPD tahun 2013.

Transfer pembelajaran terjadi lebih luas dari yang diharapkan di desa-desa percontohan. Perluasan pembelajaran terjadi karena waktu yang cocok, karena sesuai dengan kebutuhan saat ini dari pemerintah desa. Misalnya perencanaan desa tahunan dan pelaksanaan rencana strategis desa. Mereka merasakan dan menyatakan bahwa setelah intervensi proyek ini, proses dan hasil perencanaan desa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Proyek Governance fokus pada mempengaruhi proses kebijakan daripada fokus pada hasil semata. Hal ini sebagaimana dilakukan pada revitalisasi kebijakan ADD. Ada rangkaian proses mulai dari tahap berbagi ide, kunjungan kerja dan kunjungan belajar ke daerah lain sampai dengan pada tahap membuat rekomendasi kebijakan. Hal ini menjadi bukti bahwa proyek ini berkontribusi pada kebijakan tersebut.

Hal serupa berlaku untuk advokasi PIK. Meskipun advokasi itu gagal dijalankan, namun ditemukan suatu bukti bahwa advokasi kebijakan bukan hanya soal teknis tetapi juga proses politik.

VI. Rekomendasi

Proyek ini ke depan ingin mendorong lebih banyak bintang-bintang perubahan di Pemerintah Daerah. Namun, tidak terfokus hanya pada beberapa individu saja yang mungkin berpindah ke dinas/instansi lain atau bahkan pindah kota. Oleh sebab itu, strategi yang digunakan adalah memperluas kelompok sasaran menjadi tiga lapis yaitu: Eselon III, Eselon IV dan staf Non-Eselon. Strategi ini untuk mengantisipasi perpindahan atau mutasi staf yang sering terjadi di pemerintahan.

Proyek ini telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat di desa dampingan. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan penguatan kapasitas lebih lanjut bagi pemerintahan desa dan kader desa agar mereka bisa terlibat lebih efektif di tingkat kecamatan dan kabupaten. Disamping itu, Pemerintah Gumas sangat merekomendasikan agar proyek ini ke depan bisa menambah jumlah desa uji coba di lokasi alur sungai yang berbeda (selain Kahayan).

Para mitra di desa uji coba maupun mitra SKPD menghendaki proyek ini tetap berlanjut, dan mendorong Gunung Mas untuk memformulasikan kebijakan Pagu Indikatif Kecamatan untuk tahun mendatang.

Sehubungan dengan kunjungan kerja dan kunjungan belajar terbukti efektif untuk mendorong perbaikan kebijakan tertentu, maka akan lebih tepat jika proyek ini ingin melanjutkan hal serupa di masa depan.

Proyek ini memiliki waktu yang relatif singkat. Dalam rangka untuk melihat perbaikan yang lebih signifikan, terutama dalam perencanaan tahunan, dan membangun diatas pondasi yang telah dibuat selama ini, dukungan tambahan sebaiknya fokus pada dua hal utama:

1. Meningkatkan modul pelatihan untuk perencanaan pemerintah dengan lebih luas, menu yang lebih komprehensif, lebih banyak waktu yang dialokasikan untuk dukungan bantuan teknis, dan topik dan keterampilan tambahan untuk meningkatkan kapasitas staf pemerintah, dan
2. Fokus pada badan-badan pemerintah yang menunjukkan komitmen dan kesiapan untuk mendukung lanjuti dengan perencanaan tahunan yang lebih baik, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan mereka.

VII. Penutup

Proyek seperti ini tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Ini adalah alat yang dapat digunakan untuk mempercepat kemajuan menuju target yang telah ditentukan. Berapa banyak atau sedikit nilai tambah yang bisa diambil, sangat tergantung pada para pemangku kepentingan dari proyek itu sendiri.



MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS PENCAPAIAN

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas FORDFOUNDATION Yayasan Tambuhak Sinta

2011



2011

Dukungan dana dari Ford Foundation



2011

Penandatanganan MoU antara Pemerintah Gunung Mas dan Yayasan Tambuhak Sinta

2012



2012

Tingkat partisipasi staf pemerintah dalam kegiatan penguatan kapasitas lebih dari 82%



2012



2012

Revitalisasi kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Perbaungan Pemerintahan Desa



2012-2013

10 dari 30 usulan masyarakat di Musrenbang Desa terealisasi



2012-2013

Penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan dengan menggunakan metode partisipatif



2012-2013

Bantuan alat pendidikan kepada Desa Tumbang Tajungan

2013



2012-2013

Penyerahan penghargaan kepada Dinas Kesehatan dan BPMPDP-KB sebagai SKPD dengan tata kelola yang baik



MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS PERJALANAN

Pemerintah Kabupaten
Gunung Mas

FORDFOUNDATION

Yayasan Tambuhak Sinta

2011	2012	2013	2013	2013
2011 Program dimulai karena adanya gap antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan	2011 Dipilih 3 Kecamatan, 6 desa ujicoba dan 7 SKPD sebagai mitra langsung proyek	2012 Advokasi Kebijakan meliputi dua hal, yaitu perubahan kebijakan ADD dan Kebijakan Pagu Indikatif 2013	2013 Pemerintah memantau pembangunan desa	2013 Penyerahan sertifikat kepada desa Tumbang Tajungan
2011 Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Yayasan Tambuhak Sinta sepakat untuk bekerja sama	2012-2013 Kegiatan peningkatan kapasitas bagi SKPD dan desa uji coba berupa pelatihan, pendampingan teknis dan kunjungan belajar	2012-2013 SKPD dan YTS melakukan monitoring dan evaluasi di desa uji coba	2012-2013 Masyarakat desa saling berbagi pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan	2013 Kampanye pendidikan dan kesehatan di desa uji coba
	2012 Pimpinan proyek melakukan FGD dengan pemerintah dan YTS untuk mendapatkan pembelajaran dari hasil monitoring.			2013 Lokakarya penutupan proyek



Yayasan Tambuhak Sinta

Jl. Rajawali VII, Srikandi III, No. 100, Bukit Tunggal, Palangka Raya 73112
Kalimantan Tengah, Indonesia